PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Kedaulatan Rakyat Hari: Rabu Tanggal: 27 Mei 2015 Halaman: 9

PEMKOT GENCAR KEJAR PBB

Penghapusan Piutang Pajak Dekati Final

YOGYA (KR) - Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta berhasil menyelesaikan regulasi terkait piutang pajak. Rencana penghapusan piutang pajak pun bakal segera direalisasikan.

Kendati demikian, tidak semua piutang akan dihapuskan. Melainkan hanya tunggakan yang sudah tidak bisa lagi ditagih serta membebani neraca keuangan. "Tunggakan itu ada dua hal, ditagih atau dihapus. Tapi kalau wajib pajak sudah meninggal dunia maupun pindah, jelas tidak bisa ditagih. Padahal setiap piutang atau tunggakan selalu muncul dalam neraca," papar Kepala DPDPK Kota Yogyakarta, Kadri Renggono di sela Panutan Pembayaran PBB di Balaikota, Selasa (26/5).

Kadri mencontohkan besaran piutang PBB yang kini mencapai Rp 47 miliar. Terdiri dari Rp 32 miliar limpahan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Yogyakarta dan piutang Rp 15 miliar yang terjadi dalam kurun waktu 2012 hingga 2014. Dari total piutang PBB tersebut, tidak semuanya dapat ditagih lantaran wajib pajak ada yang sudah meninggal dunia. Hal ini lantaran sebagian piutang tersebut telah terjadi sejak 1994. Sementara Pemkot baru mengelola PBB mulai 2012.

Oleh karena itu, supaya besaran piutang yang akan dihapuskan terjamin validitas, pihaknya tahun ini mulai melakukan pendataan ulang. Langkah awal baru empat kecamatan yakni Tegalrejo, Gondokusuman, Jetis dan Danurejan. Sedangkan sepuluh kecamatan lain akan dilakukan tahun 2016. "Kami libatkan pihak ketiga untuk mendata karena harus menemui wajib pajak satu per satu. Setelah data valid, upaya penghapusan juga tidak mudah. Masih butuh waktu panjang," imbuhnya.

Diharapkan dengan penghapusan piutang pajak yang sudah tidak dapat ditagih, neraca keuangan dari sisi administrasi semakin baik. Bukan hanya piutang PBB, melainkan pajak lain yang mengalami persoalan serupa.

Terkait program Panutan Pembayaran PBB, merupakan salah satu upaya menggencarkan realisasi pendapatan asli daerah. Kali ini Pemkot mengundang 325 wajib pajak dengan total ketetapan PBB sebesar Rp 6 miliar. Pemkot optimis, dari program tersebut mampu meraup Rp 3,5 miliar seperti tahun lalu. "Selain panutan ini, kami juga berikan layanan jemput bola pembayaran PBB hingga tingkat kecamatan serta kelurahan. Kami ingatkan supaya tidak perlu menunggu jatuh tempo," tandas Kadri.

Sementara target PBB tahun ini mencapai Rp 48 miliar. Hingga Maret lalu baru terealisasi Rp 3,4 miliar. Meski demikian, Pemkot optimis pencapaian bisa di atas 100 persen hingga akhir tahun. (Dhi)-o

Tindak Lanjut
1. .....
2. .....
Untuk Ditanggapi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005